

Surat Kabar : KOMPAS

Edisi : 4 September 2014

Subyek : Lapindo

Hal : 31

# Tanggul Lapindo Kritis

## Janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Ditagih

Kondisi tanggul kolam lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, kian kritis menyusul terkendalanya upaya perbaikan karena protes warga korban yang menuntut ganti rugi. Pemerintah daerah pun menagih janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikan persoalan sebelum dampaknya semakin meluas.

Berdasarkan pantauan di lapangan, Rabu (3/9), tinggi permukaan air di kolam lumpur di Kecamatan Porong hampir sejajar dengan permukaan tanggul. Selisihnya tinggal beberapa sentimeter sehingga luberan lumpur bisa terjadi kapan saja.

"Tinggal sedikit lagi luberan akan mengenai infrastruktur penting, yakni rel kereta api yang menghubungkan Surabaya dengan seluruh kabupaten di bagian timur Jatim dan Jalan Raya Porong, yang menjadi jalur transportasi dan jalur ekonomi," ujar Bupati Sidoarjo Saiful Ilah.

Kondisi tanggul kritis karena dua bulan ini Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tidak bekerja. Warga korban lumpur menutup seluruh akses ke kolam penampungan sehingga pekerja tidak bisa meninggikan tanggul penahan dan menyedot semburan lumpur.

Warga kecewa karena pembayaran ganti rugi yang tidak kunjung diselesaikan PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ), juru bayar PT Lapindo Brantas Inc. Perusahaan ini yang melakukan pengeboran di sumur Banjarpanji hingga keluar semburan lumpur sejak 29 Mei 2006.

Semburan lumpur menenggelamkan 671 hektar wilayah Sidoarjo di tiga kecamatan, yakni Porong, Tanggulangin, dan Jabon. Daerah yang tenggelam meliputi permukiman warga, kawasan industri, infrastruktur, sawah, dan tambak.

PT MLJ berjanji membayar ganti rugi kepada warga yang menjadi korban dan berada dalam peta area terdampak (PAT). Pemerintah pusat melalui APBN bertanggung jawab membayar ganti rugi korban di luar PAT.

Namun, hingga delapan tahun, PT MLJ tak kunjung melunasi kewajibannya. Tunggakan pembayaran mencapai Rp 781 miliar atau sekitar 20 persen. Alasannya, PT Lapindo Brantas Inc pailit.

Selain tanggul di Desa Siring, Porong, kondisi tanggul di titik 73 Dusun Ketapang, Tanggulangin, juga kritis. Bahkan, tanggul di titik 34 Desa Kedungcangkring nyaris jebol karena tak ada penyedotan lumpur.

## **Bertemu menteri**

Saiful Ilah mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan bertemu Menteri Pekerjaan Umum selaku Ketua BPLS. Dalam pertemuan itu, ia akan menagih janji Presiden Yudhoyono untuk menyelesaikan masalah lumpur sebelum akhir masa jabatannya.

"Kami akan bicarakan supaya pembayaran sisa ganti rugi ditalangi APBN 2014. Kalau pembayaran sudah dilakukan, tidak ada lagi persoalan," kata Saiful.

Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan, pihaknya sependapat apabila pemerintah pusat menalangi pembayaran sisa ganti rugi untuk korban lumpur. Selanjutnya pemerintah tinggal menagih dana talangan itu kepada PT MLJ. "Karena kondisinya MLJ ini sudah pailit sehingga tidak mampu bayar. Harus pemerintah pusat yang menalangi," ujar Soekarwo.

Kepada warga korban lumpur yang menuntut hak, ia meminta supaya tidak mengganggu kepentingan umum atau menghalangi upaya perbaikan tanggul yang berdampak pada kepentingan masyarakat luas.